

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Geografi dan Topografi

a. Letak Wilayah

Secara Geografis, Kabupaten Sleman terletak diantara $107^{\circ} 15' 03''$ dan $107^{\circ} 29' 30''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Kabupaten Sleman merupakan wilayah dataran perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian antara 100 meter hingga 2.500 meter diatas permukaan laut dengan tatanan struktur tanah bagian selatan sebagai wilayah yang relatif datar. Berbeda dengan wilayah bagian selatan, dibagian utara wilayah kabupaten sleman (lereng Merapi) kondisi tanahnya cenderung curam dan terjal, namun memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan terdapat banyak sumber air.

Hampir setengah dari luas wilayah Kabupaten Sleman merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Oleh karena itu, untuk kabupaten sleman sendiri, pengembangan usaha pertanian dan perkebunan dapat dibilang cukup prospektif. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang

Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I. Yogyakarta.

b. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara - Selatan 32 Km, Timur - Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

c. Iklim

Wilayah Kabupaten Sleman termasuk beriklim tropis basah dengan musim hujan antara bulan November-April dan musim kemarau antara bulan Mei-Oktober. Pada tahun 2000 banyaknya hari hujan 25 hari terjadi pada bulan maret, namun demikian rata-rata banyaknya curah hujan terdapat pada bulan Februari sebesar 16,2 mm dengan banyak hari hujan 20 hari. Adapun kelembaban nisbi udara pada tahun 2000 terendah pada bulan Agustus sebesar 74 % dan tertinggi pada bulan Maret dan November masing-masing sebesar 87 %, sedangkan suhu udara terendah sebesar 26,1 derajat celcius pada bulan Januari dan November dan suhu udara yang tertinggi 27,4 derajat celcius pada bulan september. Secara geologis Kabupaten Sleman merupakan daerah subur, namun mempunyai ciri sebagai kawasan yang rawan terhadap bencana

... ..

diwilayah tropis kabupaten sleman bertemperatur maksimal 33,2°C dan minimum 26°C.

d. Karakteristik Wilayah

1) Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :

- a) Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan Kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (ringbelt) sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya.
- b) Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih.
- c) Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi Kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
- d) Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Merudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia

cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu serta gerabah.

- 2) Berdasar jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer.
- 3) Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu Kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :
 - a) Wilayah aglomerasi (perkembangan Kota dalam kawasan tertentu). Karena perkembangan Kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
 - b) Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari Kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat diwilayah Kecamatan sekitarnya sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.

c) Wilayah fungsi khusus/wilayah penyangga (buffer zone). Kota Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan Kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan Kota ditinjau dari Kota Yogyakarta.

2. Penduduk, Tenaga kerja, Keluarga Berencana dan Transmigrasi

a. Banyaknya penduduk dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2008, jumlah penduduk sleman tercatat 850.176 jiwa. Dengan luas wilayah yang mencapai 574.82 km², maka kepadatan penduduk kabupaten sleman adalah 1.479 jiwa per km². Beberapa kecamatan yang relatif padat penduduknya adalah Depok dengan 3.069 jiwa per km², Mlati dengan 2.351 jiwa per km², disusul dengan kecamatan Gamping dan Godean dengan masing-masing 2.249 jiwa dan 2.133 jiwa per km².

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)	Jumlah penduduk (jiwa)	Kepadatan (Km ²)
		Desa	Dusun			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kec. Moyudan	4	65	2.762	33.595	1.216
2	Kec. Godean	7	57	2.684	57.245	2.133
3	Kec. Minggir	5	68	2.727	34.562	1.267
4	Kec. Gamping	5	59	2.925	65.789	2.249
5	Kec. Sevegan	5	67	2.663	42.151	1.583

6	Kec. Sleman	5	83	3.132	55.549	1.774
7	Kec. Ngaglik	6	87	3.852	65.927	1.712
8	Kec. Mlati	5	74	2.852	67.037	2.351
9	Kec. Tempel	8	98	3.249	46.386	1.428
10	Kec. Turi	4	54	4.309	32.544	755
11	Kec. Prambanan	6	68	4.135	44.003	1.064
12	Kec. Kalasan	4	80	3.584	54.621	1.524
13	Kec. Berbah	4	58	2.299	40.226	1.750
14	Kec. Ngemplak	5	82	3.571	44.382	1.243
15	Kec. Pakem	5	61	4.384	30.713	701
16	Kec. Depok	3	58	3.555	109.092	3.069
17	Kec. Cangkringan	5	73	4.799	26.354	549
	Jumlah	86	1.212	57.482	850.176	

b. Tenaga Kerja

Dari 11.859 pencari kerja, sebanyak 4.094 orang (termasuk pendaftar tahun sebelumnya) telah ditempatkan bekerja yang bekerja dalam berbagai sector. Banyaknya pencari kerja yang mendaftar dalam Dinas Nankersos Kabupaten Sleman pada tahun 2008 tercatat sebanyak 11.859 orang. Sebagian besar dari mereka yakni sebanyak 5.129 orang (43.25%) berpendidikan SMA atau sederajat, disusul oleh lulusan Sarjana sebanyak 4.722 orang (39,82%). Pencari kerja yang berpendidikan SD dan SMP masing-masing tercatat 37 orang (0.3%) dan 216 orang (2.6%).

Sebagian besar yakni sebanyak 2.852 orang terserap pada sector Industry Pengolahan, Kemudian diikuti sector jasa Kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebanyak 847 orang. Dilihat menurut wilayah penempatan, para pencari kerja disalurkan melalui 3 kelompok yakni Antar Lokal (AKAL), Antar Daerah (AKAD)

melalui AKAL, serta masing-masing sebanyak 602 orang (8,41%) dan 148 orang (3,6%) melalui AKAD dan AKAN.

c. Keluarga Berencana

Sebagai upaya untuk mengendalikan banyaknya penduduk, Pemerintah melancarkan program KB. Program ini disamping untuk menekan ledakan penduduk juga dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pasangan usia subur (PUS) yang merupakan salah satu sasaran program KB tahun 2008 tercatat sebanyak 147.379 pasangan. Mereka tersebar dalam 17 Kecamatan dengan jumlah terbesar adalah Kecamatan Depok, sebanyak 15.168 pasangan (10,29%) disusul Kecamatan Gamping 13.691 (9,29%) pasangan dan kecamatan Mlati sebanyak 12.255 pasangan (8,31%). Kecamatan yang memiliki PUS relatif sedikit adalah Minggir sebanyak 4.263 pasangan (2,88%) dan beberapa Kecamatan lainnya seperti Moyudan, Turi, Cangkringan dan Pakem yang masing-masing sekitar 4.508 (3,17%) sampai dengan 5.368 pasangan (3,64%). Jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 tercatat sebanyak 117.882 pasangan.

d. Transmigrasi

Penempatan transmigrasi menurut daerah penempatannya dibedakan dua kawasan yaitu kawasan barat dan kawasan timur. Kawasan barat terdiri dari D.I Aceh, Riau, Sumatera utara, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera selatan. Sementara kawasan timur terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan

dan Kalimantan Timur. Untuk kawasan barat menerima penempatan sebanyak yaitu 28 KK atau 97 jiwa dan semuanya Transmigrasi Umum (TU). Sementara wilayah kawasan timur menerima penempatan sebanyak 21 KK atau 79 jiwa semuanya TU.

3. Sosial

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan penduduknya. Beberapa factor utama yang mendukung menyelenggarakan pendidikan adalah ketersediaannya sekolah yang memadai beserta sarana dan prasarananya, pengajar, dan keterlibatan anak didik maupun komite sekolah.

Pada jenjang SD, kabupaten sleman pada tahun 2008/2009 memiliki sebanyak 498 unit sekolah yang terdiri dari 382 SD negeri dan 117 SD Swasta dengan jumlah kelas masing-masing sebanyak 2,668 kelas untuk SD negeri dan 896 kelas untuk SD swasta. Banyaknya Guru SD mencapai 4.177 orang di SD negeri dan 1,461 orang di SD swasta. Adapun peserta didik yang sedang mengenyam pendidikan tercatat sebanyak 84.433 anak yang terbagi menjadi 64.710 anak besekolah diSD negeri dan 19.723 anak di SD swasta.

Pada jenjang SMP, Jumlah sekolah tercatat sebanyak 104 sekolah yang terdiri dari 55 SMP negeri, 49 SMP swasta dan menyediakan kelas masing-masing sebanyak 672 kelas untuk SMP negeri dan 200 kelas untuk SMP swasta. Banyaknya

guru yang mengajar di SMP tercatat sebanyak 2,772 orang. Sebagian besar dari mereka 1.848 orang mengajar di SMP negeri, sedangkan selebihnya di SMP swasta.

Untuk jenjang yang lebih tinggi yakni SMU, tersedia sebanyak 51 sekolah dengan 17 SMA negeri dan 31 SMA swasta. Dengan mengamati banyaknya institusi, terlihat bahwa peran swasta di Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan SMA lebih besar dibanding dengan peran pemerintah. Tetapi jika dilihat dari banyaknya kelas, terjadi hal yang sebaliknya. SMU swasta hanya memiliki 167 kelas, sedangkan SMU negeri memiliki 224 kelas. Banyaknya guru di SMU negeri yakni 747 orang dan banyaknya guru di SMU swasta 699 orang, dengan murid di SMU negeri sebanyak 7.792 orang dan di SMU swasta sebanyak 3.884 orang. Dengan membandingkan jumlah guru dan murid di SMA negeri dan swasta, secara jelas terlihat bahwa rasio murid terhadap guru SMU swasta lebih kecil dibandingkan dengan SMA negeri. Kondisi ini bisa jadi disebabkan oleh tingginya minat peserta didik yang memilih SMA negeri, yang pada umumnya mengenakan biaya pendidikan lebih rendah.

b. Agama

Komposisi penduduk menurut agama yang dianut, pada tahun 2008 mencatat sekitar 858.026 orang beragama Islam, Katolik sebanyak 63.307 orang, disusul oleh agama Kristen sebanyak 26.047 orang. Adapun penduduk Beragama Hindu dan Budha masing-masing tercatat sebanyak 1.489 orang dan 905 orang. Penduduk

orang. Dari jumlah tersebut jemaah terbanyak berasal dari Kecamatan Depok yaitu 203 orang (17.41%), sedangkan paling sedikit dari kecamatan Sayegan dengan 20 orang.

4. Pemerintahan

Jumlah pegawai instansi otonom pada tahun 2008 sebanyak 13.356 orang. Dan dari jumlah tersebut, 201 orang adalah pegawai golongan I, 2.601 orang adalah pegawai golongan II, 5.271 orang adalah golongan III, dan 5.283 orang adalah pegawai golongan IV. Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, pegawai otonom terdiri dari 204 pegawai berijazah SD, 404 berijazah SMP, 3714 pegawai berijazah SMA, 4.172 pegawai berijazah D1-D3, Dan 4.832 pegawai berijazah D4-S2.

Sedangkan untuk jumlah pegawai instansi vertical yang ada di Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 1.538 orang yang terdiri dari 1 pegawai golongan I, 198 pegawai golongan II, 975 pegawai golongan III, dan 363 pegawai IV. Bila dilihat dari tingkat pendidikannya, pegawai instansi vertical tersebut terdiri dari 8 pegawai berijazah SD, 22 Pegawai berijazah SMP, 364 pegawai berijazah SMA, 345 pegawai berijazah D3 dan 708 pegawai berijazah S1/S2

B. Profil Pemerintah Kabupaten Sleman

1. Sejarah Kabupaten Sleman

a. Periode 1916-1945

Secara administratif, keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilacak pada Rijktsblad no. 11 tahun 1916 yang membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta (Mataram) dalam 3 Kabupaten, yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman (yang kemudian disebut Sleman), dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. Secara hierarkhis, Kabupaten membawahi distrik yang dikepalai seorang Panji. Dalam Rijktsblad tersebut juga disebutkan bahwa kabupaten Sulaiman terdiri dari 4 distrik yakni : Distrik Mlati (terdiri 5 onderdistrik dan 46 kalurahan), Distrik Klegoeng (terdiri 6 onderdistrik dan 52 kalurahan), Distrik Joemeneng (terdiri 6 onderdistrik dan 58 kalurahan), Distrik Godean (terdiri 8 onderdistrik dan 55 kalurahan).

Pada tahun yang sama, berturut-turut dikeluarkan Rijktsblad no.12/1916, yang menempatkan Gunung Kidul sebagai kabupaten keempat wilayah Kasultanan Yogyakarta yang kemudian disusul dengan Rijktsblad No.16/1916 yang mengatur keberadaan Kabupaten Kota. Sedangkan Rijktsblad 21/1916 mengatur keberadaan kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, pada tahun tersebut wilayah Kasultanan Yogyakarta berkembang dari 3 kabupaten menjadi 6 Kabupaten. Pembagian wilayah Kesultanan Yogyakarta tersebut pada tahun 1927 dengan mengalami penyederhanaan melalui munculnya Rijktsblad No. 1/1927. Enam Kabupaten yang terdapat di wilayah kasultanan disederhanakan menjadi 4 kabupaten yakni Kabupaten Yogyakarta

Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul. Dalam hal ini, Kabupaten Sleman mengalami penurunan status menjadi distrik Kabupaten Yogyakarta. Pada tahun 1940, wilayah Kasultanan Yogyakarta mengalami reorganisasi dengan munculnya Rijktsblad Van Jogjakarta No.13/1940 tanggal 18 Maret 1940. Rijktsblad tersebut membagi wilayah kasultanan Yogyakarta tetap dalam 4 Kabupaten dengan pemampatan pada distrik masing-masing kabupaten.

- 1) Kabupaten Yogyakarta, terdiri 2 (dua) distrik (Distrik Kota dan Distrik Sleman).
- 2) Kabupaten Sleman yang terdiri 4 (empat) distrik.
- 3) Kabupaten Kulon Progo terbagi 2 (dua) distrik.
- 4) Kabupaten Gunung Kidul terbagi 3 (tiga) distrik.

Pembagian wilayah tersebut tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1942 dengan Jogjakarta Kooti, Kasultanan Yogyakarta lebih memerinci wilayahnya sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Yogyakarta dengan Bupati KRT. Harjodiningrat. Kabupaten Yogyakarta dibagi menjadi 3 (tiga) Kawedanan, yakni kawedanan Sleman dengan penguasa R. Ng. Pringgo Sumadi dan Kawedanan Kalasan dengan penguasa R. Ng. Pringgo Biyono.
- 2) Kabupaten Bantul (Ken) dengan Bupati KRT. Dirjokusumo dan wilayahnya dibagi menjadi 4 (empat) kawedanan yakni Bantul Kotagede

- 3) Kabupaten Gunung Kidul dengan Bupati KRT. Djodjodiningrat dan wilayahnya terbagi menjadi 3 (tiga) kawedanan yakni Wonosari, Playen dan Semanu.
- 4) Kabupaten Kulon Progo dengan Bupati KRT. Pringgohadingrat, dengan wilayah yang terbagi menjadi 2 (dua) kawedanan yaitu Nanggulan dan Sentolo.

Pada tanggal 8 April 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan penataan kembali wilayah Kasultanan Yogyakarta melalui Jogjakarta Koorei angka 2 (dua). Dalam Koorei tersebut dinyatakan wilayah Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi lima Kabupaten yakni Kabupaten Kota Yogyakarta (Yogyakarta Syi), Kabupaten Sleman (Sleman Ken), Kabupaten Bantul (Bantul Ken), Kabupaten Gunung Kidul (Gunung Kidul Ken) dan Kabupaten Kulon Progo (Kulon Progo Ken). Penataan ini menempatkan Sleman pada status semula, sebagai wilayah Kabupaten.

b. Periode 1945-1947

Jogjakarta Koorei angka 2 (8 April 1945) menjadikan Sleman sebagai pemerintahan Kabupaten untuk kedua kalinya dengan KRT Pringgodiningrat sebagai bupati. Pada masa itu, wilayah Sleman membawahi 17 kapewon (Son) yang terdiri dari 258 kalurahan (Ku). Ibu kota kabupaten berada di wilayah utara, yang saat ini dikenal sebagai desa Triharjo (Kecamatan Sleman). Bila dibandingkan dengan pemerintahan kabupaten lainnya di tanah Jawa, infrastruktur yang dimiliki Sleman sangat terbatas. Fasilitas yang dimiliki adalah gedung pusat pemerintahan, pasar

(yang saat ini dikenal sebagai pasar Sleman), Masjid (Masjid Sleman) dan stasiun kereta api (lokasinya sudah berubah menjadi taman segi tiga Sleman). Sedangkan infrastruktur seperti alun-alun, penjara, markas prajurit dan sebagainya sebagai syarat ibukota, tidak dimiliki.

Di era revolusi, para pegawai pemerintah meninggalkan ibukota Sleman ikut keluar kota mengatur strategi. Dalam keadaan demikian perkantoran pemerintahan Kabupaten Sleman menjadi sepi dan terjadi "bumi angkut" oleh gerombolan masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Akibatnya gedung-gedung pemerintah tidak layak lagi menjadi tempat pelayanan masyarakat.

c. Periode 1947-1964

Dalam kondisi gedung-gedung pelayanan masyarakat yang memprihatinkan, Bupati Sleman KRT Pringgodiningrat pada tahun 1947 memindahkan pusat pelayanan kabupaten ke Ambarukmo, di Petilasan Dalem serta bekas pusat pendidikan perwira polisi yang pertama di Indonesia (saat ini pendopo hotel Ambarukmo). Dalam hal ini, Ambarukmo merupakan pusat kegiatan pelayanan pemerintahan, bukan ibukota kabupaten. Pada tahun yang sama Bupati KRT Pringgodiningrat diganti oleh KRT Projodiningrat. Dalam periode ini, tepatnya tahun 1948, wilayah Kasultanan Yogyakarta mulai melaksanakan pemerintahan formal.

... 1 ... III ... 22 Tahun 1948 ... Kabupaten wilayah Kabupaten Sleman

Pada tahun 1950 Bupati KRT Projodiningrat digantikan oleh KRT Dipodiningrat hingga tahun 1955. Selanjutnya, KRT Dipodiningrat digantikan oleh KRT Prawirodiningrat, yang menjabat Bupati Sleman hingga tahun 1959. Pada masa itu pemerintah RI mengeluarkan UU no. 1 tahun 1957 mengenai Pembagian Daerah Republik Indonesia dan Aturan Otonomi Daerah, maka penyebutan Kabupaten Sleman berubah menjadi daerah Swatantra. Sebagai implementasinya Departemen Dalam Negeri menerbitkan peraturan bahwa selain memiliki seorang Bupati yang diangkat secara sektoral sebagai pegawai Kementrian Dalam Negeri, Kabupaten juga harus memiliki kepala daerah yang dipilih legislatif (DPRD). Dengan kata lain, dalam periode pemerintahan ini, sebuah kabupaten memiliki 2 (dua) Kepala Daerah. Terpilih sebagai Kepala Daerah Swatantra adalah Buchori S. Pranotodiningrat. Seiring terbitnya Penetapan Presiden no. 6 Tahun 1959 dan no. 5 Tahun 1960, untuk memberlakukan kembali UUD 1945, pemerintahan Kabupaten Sleman kembali dikepalai seorang Bupati/Kepala Daerah, yang dijabat oleh KRT. Murdodiningrat.

d. Periode 1964-sekarang

Pada tahun 1964, KRT Murdodiningrat memindahkan pusat pemerintahan ke Dusun Beran, Desa Tridadi Kecamatan Sleman. Lokasinya menempati bangunan kantor Bappeda Sleman (sekarang). Pada masa ini pula Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman mulai memiliki lambang daerah. Munculnya UU No.18 tahun 1965 mengenai

Sleman dengan menerbitkan SK. no. 19/1966 yang mengubah sebutan Pemerintah Daerah Tingkat II Sleman menjadi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dan DPRD Gotong Royong Tingkat II Sleman menjadi DPRD Gotong Royong Kabupaten Sleman. Pada masa tersebut ketua DPRD Gotong Royong dijabat Soekirman Tirtoatmodjo. Seiring berakhirnya masa keanggotaan DPRD Gotong Royong pada tahun 1971, jabatan ketua DPRD digantikan oleh Soelanto. Selanjutnya pada tahun 1974, UU no. 18 tahun 1965 digantikan UU no. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Berorientasi pada Undang-undang ini pemerintahan daerah Sleman menggunakan penyebutan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sleman.

Pada tahun 1974, KRT. Murdodiningrat digantikan oleh KRT Tedjo Hadiningrat, yang hanya menjabat selama 3 bulan. Selanjutnya posisi bupati dijabat Drs. KRT. H. Prodjosuyoto Hadiningrat, yang menjabat 2 periode (th.1974-1985) dengan 2 kali penggantian ketua DPRD. Pada tahun 1977, posisi Soelanto sebagai ketua DPRD digantikan oleh R. Soelarjo hingga tahun 1982, yang selanjutnya digantikan Samingan H.S. Pada tahun 1985 Drs. KRT. H. Prodjosuyoto Hadiningrat digantikan Drs. Samirin, yang menjabat selama satu periode (1985-1990). Pada masa jabatannya, Drs. Samirin mengalami sekali pergantian ketua DPRD Sleman yakni pada tahun 1987, Samingan H. S. digantikan Letkol. Sudiyono, yang menjabat 2 periode masa jabatan (1987-1997).

2. Hari Jadi Kabupaten Sleman

Keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman memiliki arti penting bagi masyarakat dan Pemerintah daerah untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan untuk menjiwai gerak langkah menuju masa depan. Berdasarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998, tertanggal 9 Oktober 1998, yang menetapkan tanggal 15 Mei Tahun 1916 yang merupakan hari jadi Kabupaten Sleman. Dalam penanggalan Jawa, Kabupaten Sleman jatuh pada hari Senin Kliwon tanggal 12 Rejeb Tahun Jawa 1846 waktu wayang.

Surya Sengkala hari jadi Kabupaten Sleman yakni perhitungan berdasarkan tahun Masehi yang jatuh pada Rasa Manunggal Hanggatra Negara. Yang mempunyai arti Rasa = 6, Manunggal = 1, Hanggatra = 9, Negara = 1, sehingga terbaca 1916. Sementara menurut Candra Sengkalanya yakni perhitungan yang berdasarkan tahun Jawanya hari jadi Sleman adalah Anggana Catur Salira Tunggal, yang memiliki arti Anggrana = 6, Catur = 4, Salira = 8, Tunggal = 1, sehingga dari Candra Sengkala tersebut terbaca 1946. Hari jadi Penetapan hari jadi ini akan melengkapi identitas yang saat ini dimiliki Kabupaten Sleman.

3. Slogan Kabupaten Sleman

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, diperlukan suatu acuan untuk memotivasi dan mengerahkan seluruh potensi masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut Kabupaten Sleman pada tanggal 2 Maret 1991 mencanangkan slogan

***Gambar 2.1 Lambang
Kabupaten Sleman***



Dasar hukum, landasan kekuatan slogan tersebut adalah Perda No. 4 Tahun 1992 tentang Slogan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu SLEMAN SEMBADA. Gerakan pembangunan desa terpadu SLEMAN SEMBADA merupakan gerakan dari, oleh dan untuk masyarakat Sleman dengan kekuatan sendiri. Artinya, hasil-hasil dari dinamika tersebut diharapkan dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Tak dapat dipungkiri, SLEMAN SEMBADA merupakan slogan baru. Akan tetapi nilai-nilai yang dikandungnya bukanlah sesuatu yang baru karena slogan tersebut merupakan kristalisasi dan formulasi dari nilai-nilai budaya dan kehidupan keseharian masyarakat Sleman.

Makna dan Tujuan

Kata SEMBADA memiliki makna utuh sebagai sikap dan perilaku rela berkorban dan bertanggung jawab untuk menjawab dan mengatasi segala masalah, tantangan, baik yang datang dari luar maupun dalam, untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kata SEMBADA merupakan sikap yang SEMBADA (Bahasa Jawa) yang merupakan kepribadian pantang menyerah, tabu

S : Sehat
E : Elok dan Edi
M : *Makmur dan Merata*
B : Bersih dan Berbudaya
A : Aman dan Adil
D : Damai dan Dinamis
A : Agamis

Dengan nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menciptakan Dati II Sleman yang Sejahtera, **LE**stari dan **MAN**diri. Ujung tombak gerakan slogan **SLEMAN SEMBADA** berada di tingkat dusun, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja LKMD bersama tokoh masyarakat dan semua lembaga masyarakat yang di tingkat dusun. Sedangkan pelaksanaan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten pada hakekatnya merupakan pendukung pelaksanaan slogan **SLEMAN SEMBADA** di tingkat dusun. Dalam kehidupan sehari-hari, Slogan **SLEMAN SEMBADA** diharapkan mewujudkan dalam: pembangunan berwawasan lingkungan, budaya hidup bersih dan sehat, memberikan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Sleman yang bersih dan sehat

4. Visi Misi Kabupaten Sleman

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2005-2010 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu

“Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera, Lebih Damai, dan Lebih Sehat”

a. Visi

Perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya. Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sleman yang terdiri dari aparaturnya pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masa depan.

b. Misi

1) Menjaga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam terus menjaga cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Penegakan supremasi hukum dilakukan untuk menjaga norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat.

2) Menjaga keberlanjutan kegiatan perekonomian masyarakat.

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan.

3) Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif, dan berakhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi mutu pelayanan dasar.

C. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman

1. Profil BKD Kabupaten Sleman

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman, pada awalnya merupakan unit kerja yang ada di bawah Sekretariat Daerah yaitu Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 1993 tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dan Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman. Bagian Kepegawaian mempunyai tugas: Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, penugasan, program dan

petunjuk pembinaan dan pengembangan kepegawaian serta melaksanakan mutasi pegawai dan tata usaha kepegawaian.

Namun sekarang, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman merupakan unit pelaksana sekaligus perumus kebijakan daerah dibidang pengelolaan kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dibidang kepegawaian daerah seperti BKD mempunyai perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan kepegawaian daerah dan pemberi pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan keputusan Bupati Sleman No 38/Kep.KDH/A/2004 tentang struktur organisasi, maka penjabaran tugas pokok dan fungsi tata kerja BKD Sleman, Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 yaitu:

1. Badan Kepegawain Daerah kabupaten Sleman Sebagai Unsur Penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
2. Badan Kepegawaian daerah mempunyai tugas dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah dibidang pengelolaan Kepegawaian Daerah.
3. Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam ayat dua, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas sebagai perumus

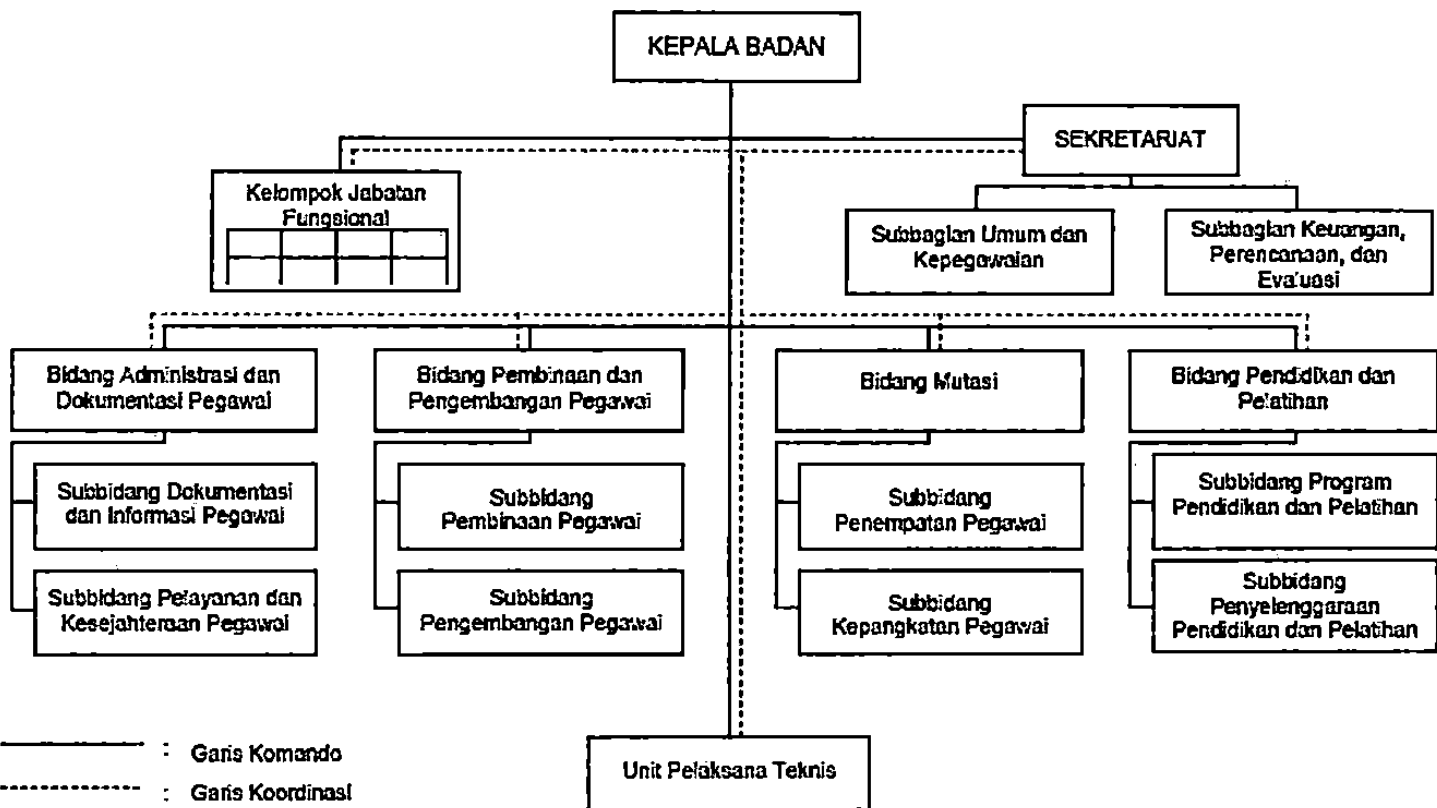
kebijakan daerah dibidang pengelolaan kepegawaian dan sebagai pemberi pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 2.2 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Fungsinya

Jabatan	Tugas	Fungsi
Sekretaris	Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penusunan rencana kerja Sekretariat b. Penyelenggaraan urusan umum c. Penyelenggaraan urusan kepegawaian d. Penyelenggaraan urusan keuangan e. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi
Bidang Administrasi Dan Dokumentasi Pegawai	Menyelenggarakan dan membina pengelolaan dokumentasi dan informasi pegawai serta pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai	<ul style="list-style-type: none"> a. Penusunan rencana kerja bidang administrasi dan dokumentasi pegawai b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi pegawai c. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi pegawai d. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang administrasi dan dokumentasi pegawai
Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana kerja bidang pembinaan dan pengembangan pegawai

	pengembangan pegawai	<ul style="list-style-type: none"> b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pegawai c. Penyelenggaraan pembinaan pegawai d. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan pegawai
Bidang Mutasi	Menyelenggarakan dan membina penempatan dan pengelolaan kepangkatan pegawai	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana kerja bidang mutasi b. Perumusan kebijakan teknis penempatan dan pengelolaan kepangkatan pegawai c. Pengelolaan dan pembinaan penempatan dan pengelolaan kepangkatan pegawai d. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang mutasi
Bidang Pendidikan Dan Pelatihan	Menyelenggarakan, membina, dan mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan serta penyusunan program pendidikan dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana kerja bidang pendidikan dan pelatihan b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan serta penyusunan program pendidikan dan pelatihan c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Perda no 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

Keterangan :

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman terdiri

dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Evaluasi
3. Bidang Administrasi dan Dokumentasi Pegawai

- b. Sub Bidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai
- 4. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai
 - a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai
 - b. Sub Bidang pengembangan Pegawai
- 5. Bidang Mutasi
 - a. Sub Bidang Penempatan Pegawai
 - b. Sub Bidang kepengkatan Pegawai
- 6. Bidang pendidikan dan Pelatihan
 - a. Sub Bidang Program Pendidikan dan Pelatihan
 - b. Sub Bidang Penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan

2. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman

Visi

"Instansi yang mampu mengelola manajemen kepegawaian untuk mewujudkan sumberdaya aparatur yang berkualitas dan profesional"

Misi

Sedangkan misi badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman adalah menyediakan dan mengembangkan sumberdaya aparatur yang berkualitas dan professional dalam melayani masyarakat sesuai ketugasannya sebagai administrator dan penyelenggaraan masyarakat melalui:

- a. Pemantapan perencanaan dan pengembangan karier PNS

- c. Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang berhubungan dengan posisi, peran dan tanggung jawab aparatur
- d. Melaksanakan penempatan PNS berdasarkan system prestasi kerja dan system karir
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang akurat
- f. Melaksanakan pembinaan sikap dan moralitas aparatur, mental dan karakter serta pengelolaan kesejahteraan sumber daya aparatur pemerintah

3. Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman meliputi :

- 1. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian
- 2. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan karir PNS
- 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan
- 4. Melaksanakan mutasi PNS
- 5. Melaksanakan pembinaan sikap dan moralitas aparatur dan pengelolaan kesejahteraan pegawai
- 6. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan organisasi

4. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai dalam Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman sam

ni dengan bulan Oktober 2000 111 111 111

Tabel 2.3 Jumlah pegawai menurut golongan

No	Golongan/Rank	Jumlah pegawai
1	Golongan I	0
2	Golongan II	17
3	Golongan III	57
4	Golongan IV	6
	Total	80

(Sumber : Lakip BKD Kabupaten Sleman Tahun 2008)

Berdasarkan table diatas dapat diuraikan masing-masing jumlah pegawai berdasarkan golongan yang menyimpulkan bahwa jumlah pegawai Badan Kepegawaian Daerah lebih didominasi oleh Golongan III yang menempati jumlah pegawai terbanyak dengan 57 personal. Jumlah yang berbanding berlawanan dengan pegawai golongan I yang tidak diisi oleh satu orang pun. Dan masing-masing untuk golongan II dengan 17 personal, dan Golongan IV dengan 6 personal.

Tabel 2.4 Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan terakhir

No	Pendidikan terakhir	Jumlah pegawai
1	SD	2
2	SMP	0
3	SMA	25
4	D1-D3	5
5	D4/S1-S2	48
	Total	80

(Sumber : Lakip BKD Kabupaten Sleman Tahun 2008)

Berdasarkan table diatas dapat digambarkan bahwa Pegawai Badan Kepegawaian Daerah didominasi oleh pegawai yang berlatarbelakang dengan pendidikan terakhir Master atau S1-S2 dengan jumlah pegawai 48 personal. Tempat

... .. pendidikan terakhir SMA dengan 25 personal

Dan masing-masing SD dengan 2 personal, SMP yang tidak membuahkan 1 pegawai pun atau dengan 0 personal, yang terakhir D1-D3 dengan 5 personal.

5. Sarana Dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana kerja yang menunjang dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan pegawai Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana

No	Macam/Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Gedung	1	Baik
2	Kendaraan Roda empat	6	Baik
3	Kendaraan roda dua	10	Baik
4	Meja	60	Baik
5	Kursi	60	Baik
6	Filling cabinet	21	Baik
7	Mesin ketik	6	Baik
8	Komputer	26	Baik
9	Laptop	4	Baik
10	Ruang rapat	6	Baik
11	LCD	4	Baik

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman cukup memadai dan lengkap karena didukung dengan kondisi sarana dan prasarana yang keadaannya

baik sehingga dapat mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan